

Sinergi Partisipasi Masyarakat Marginal dalam Mewujudkan Kemandirian Desa: Studi Kasus Desa Masgo, Kabupaten Kerinci

Jira Tania

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
jiratania2003@gmail.com

Welhendri Azwar

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
welhendriazwar@uinib.ac.id

Muhamad Jamil

STAI Yayasan Tarbiyah Islamiah Padang
jamil@staiyastispadang.ac.id

ABSTRACT

Masgo Village is one of the remote villages in Kerinci Regency that experiences marginalization in social, economic, and infrastructural aspects. This study aims to examine the extent to which the participation of marginalized communities can synergize with village government efforts in building sustainable village self-reliance. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that despite their marginalized condition, the people of Masgo Village possess strong social capital, such as a spirit of mutual cooperation and high community solidarity. Community participation is evident in various local initiatives, such as road repairs, water resource management, and the formation of farmer groups. However, participation in formal forums like village deliberations remains procedural and lacks inclusivity. The study recommends the need for empowerment strategies and facilitation from the village government so that the community's participatory potential can evolve into a transformative force for achieving village self-reliance.

Keywords: *Participation, Marginalized Community, Village Self-Reliance, Masgo Village*

ABSTRAK

Desa Masgo merupakan salah satu desa terpencil di Kabupaten Kerinci yang mengalami kondisi marginal baik secara sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana partisipasi masyarakat marginal dapat bersinergi dengan pemerintah desa dalam membangun kemandirian desa secara berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

meskipun berada dalam kemarginalan, masyarakat Desa Masgo memiliki kekuatan sosial seperti semangat gotong royong dan solidaritas komunitas yang tinggi. Partisipasi warga terlihat dalam berbagai inisiatif lokal seperti perbaikan jalan, pengelolaan sumber air, dan pembentukan kelompok tani. Namun, partisipasi dalam forum formal seperti musyawarah desa masih bersifat prosedural dan kurang inklusif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi pemberdayaan dan fasilitasi dari pemerintah desa agar potensi partisipatif masyarakat dapat berkembang menjadi kekuatan transformatif dalam mewujudkan kemandirian desa.

Kata kunci: *Partisipasi, Masyarakat Marginal, Kemandirian Desa, Desa Masgo*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, desa tidak hanya menjadi ruang geografis, tetapi juga entitas sosial yang memiliki potensi sumber daya manusia dan alam yang besar. Namun, tidak semua desa memiliki tingkat akses, partisipasi, dan daya saing yang sama dalam pembangunan. Banyak desa yang hingga kini masih tergolong sebagai desa tertinggal, termasuk Desa Masgo yang terletak di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Desa ini menghadapi sejumlah tantangan klasik seperti akses jalan yang rusak, minimnya layanan pendidikan dan kesehatan, serta terbatasnya peran masyarakat dalam proses pembangunan desa. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya gejala kemarginalan, yaitu keterpinggiran masyarakat dari sistem sosial, ekonomi, dan politik yang seharusnya mereka akses secara adil.

Kemarginalan masyarakat bukan hanya terjadi karena keterbatasan sumber daya, tetapi juga akibat minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang aktif menentukan prioritas dan arah pembangunan desa. Hal ini bertentangan dengan semangat filosofis pembangunan Indonesia yang digariskan dalam Pancasila, khususnya sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam sila tersebut, terdapat nilai bahwa pembangunan harus memberikan manfaat yang adil dan merata bagi semua warga negara, termasuk masyarakat marginal di pedesaan.

Prinsip keadilan sosial tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara eksplisit menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan. UU ini menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, dalam dokumen Panduan Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi dan Inklusi Sosial yang diterbitkan oleh Kemendesa PDTT (2023), ditegaskan bahwa pendekatan partisipatif merupakan strategi kunci dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dan mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan.

Dari sisi teoritis, pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa memiliki akar kuat dalam literatur pembangunan komunitas. Pretty (1995) mengklasifikasikan partisipasi masyarakat ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari partisipasi pasif hingga partisipasi interaktif. Tingkatan yang paling ideal adalah partisipasi interaktif, di mana masyarakat terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, melaksanakan program, dan mengevaluasi hasilnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima manfaat pembangunan, tetapi juga mengendalikan prosesnya.

Selain itu, pendekatan kapabilitas yang diperkenalkan oleh Amartya Sen (1999) memberikan perspektif yang lebih mendalam dalam melihat pembangunan sebagai proses memperluas kebebasan dan kemampuan individu untuk memilih kehidupan yang mereka nilai berharga. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat marginal, pendekatan ini sangat relevan karena menekankan bahwa pembangunan harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri, bukan sekadar memberikan bantuan ekonomi atau infrastruktur. Sutaryo dan Pribadi (2020) kemudian mengadaptasi pendekatan ini dalam konteks pembangunan desa di Indonesia, dan menekankan pentingnya strategi yang memberdayakan, bukan memanjakan masyarakat.

Kondisi faktual di Desa Masgo menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi berbagai hambatan struktural. Infrastruktur jalan utama menuju desa mengalami kerusakan parah, yang menghambat mobilitas dan akses terhadap layanan publik. Fasilitas pendidikan hanya tersedia sampai tingkat dasar dengan kualitas yang rendah, sedangkan layanan kesehatan sangat terbatas. Akses terhadap sumber daya ekonomi, termasuk lahan produktif dan permodalan, juga masih belum merata. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit keluar dari

lingkaran ketertinggalan. Laporan Bappeda Kabupaten Kerinci (2023) menyebutkan bahwa Desa Masgo masih tergolong sebagai desa tertinggal dengan indeks pembangunan desa yang rendah.

Meski demikian, di tengah keterbatasan tersebut, terdapat inisiatif lokal yang menunjukkan potensi partisipasi sosial. Warga desa melakukan kegiatan gotong royong untuk memperbaiki jalan, membentuk kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas pertanian, serta melakukan musyawarah internal untuk menyelesaikan persoalan bersama. Partisipasi ini umumnya bersifat informal dan spontan, belum terlembagakan secara sistematis. Namun, hal ini menunjukkan adanya kekuatan sosial yang dapat menjadi landasan bagi pemberdayaan yang lebih luas.

Penelitian Aulia dan Handayani (2022) menemukan bahwa model pemberdayaan berbasis partisipasi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat desa. Ketika masyarakat diberi ruang dan kepercayaan untuk terlibat dalam pembangunan, mereka akan menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang lebih besar. Demikian pula, Damayanti dan Purwanto (2021) dalam studinya membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat marginal dalam musyawarah desa dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dan menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk partisipasi masyarakat marginal di Desa Masgo dapat disinergikan dalam strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif bukan hanya sekadar metode teknis, tetapi merupakan strategi transformasi sosial yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan. Oleh karena itu, studi ini akan membahas bagaimana dinamika partisipasi warga desa marginal dapat menjadi fondasi dalam mendorong kemandirian desa, serta sejauh mana sinergi antara inisiatif masyarakat dan kebijakan pemerintah desa dapat menciptakan pembangunan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Library Research (Studi Kepustakaan). Library Research adalah penelitian yang dilakukan

dengan mengumpulkan informasi dan data menggunakan berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan, wawancara

Data lapangan, seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu yang relevan, artikel, catatan, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan (Amul Lia, 2023; Assyakurrohim et al., 2023; M. Sari & Asmendri, 2020; R. K. Sari, 2021; Zubaidillah & Nuruddaroini, 2020). Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data diperoleh dari data lapangan, artikel, jurnal, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini (Assyakurrohim et al., 2023; M. Sari & Asmendri, 2020; R. K. Sari, 2021).

PEMBAHASAN

Bentuk Partisipasi Masyarakat Marginal di Desa Masgo

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, partisipasi masyarakat marginal di Desa Masgo dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu partisipasi dalam kegiatan sosial berbasis komunitas dan partisipasi yang masih terbatas dalam forum-forum formal pemerintahan desa. Pada tingkat komunitas, keterlibatan warga tercermin secara nyata dalam berbagai aktivitas kolektif, seperti gotong royong memperbaiki infrastruktur jalan desa, pembangunan saluran air bersih, pembentukan kelompok tani, serta kegiatan keagamaan yang terorganisasi dalam kelompok ibu-ibu pengajian. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak hanya mencerminkan semangat solidaritas sosial, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengatasi persoalan lokal yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh layanan pemerintahan desa.

Dalam kerangka teoritis, bentuk partisipasi semacam ini dapat dipahami melalui pendekatan tipologi partisipasi yang dikembangkan oleh Pretty (1995), yang mengelompokkan partisipasi masyarakat ke dalam berbagai tingkatan mulai dari simbolik hingga transformatif. Kegiatan sosial masyarakat Masgo umumnya dapat dikategorikan ke dalam partisipasi fungsional dan partisipasi interaktif, di mana warga tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif mengidentifikasi permasalahan dan turut merancang serta melaksanakan solusi bersama. Hal ini menandakan bahwa terdapat potensi lokal yang kuat

untuk mendukung pembangunan berbasis masyarakat, yang jika difasilitasi dengan tepat, dapat berkembang menjadi kekuatan pemberdayaan yang lebih strategis.

Namun, potret partisipasi yang ideal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam forum-formal pemerintahan desa, seperti Musyawarah Desa (Musdes). Temuan lapangan mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat marginal dalam ruang-ruang formal pengambilan keputusan masih bersifat terbatas dan cenderung prosedural. Dominasi tokoh-tokoh elit desa dalam proses perumusan kebijakan dan program pembangunan menjadikan kelompok marginal—seperti petani kecil, perempuan, dan warga dengan tingkat pendidikan rendah—kurang memperoleh ruang yang setara untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka. Akibatnya, partisipasi dalam Musdes sering kali bersifat seremonial dan tidak mencerminkan prinsip inklusi yang sesungguhnya.

Fenomena tersebut memperkuat kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat marginal di Desa Masgo belum mencapai tahapan partisipasi deliberatif, apalagi partisipasi transformatif, sebagaimana dicita-citakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif modern (Nugroho, 2018; Aulia & Handayani, 2022). Dalam pendekatan ini, partisipasi dipandang sebagai proses dialogis yang memungkinkan masyarakat terlibat secara setara dalam menentukan arah, isi, dan prioritas pembangunan, bukan sekadar sebagai pelengkap administratif. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mereformulasi mekanisme partisipatif di tingkat desa agar lebih inklusif dan representatif.

Upaya membangun partisipasi yang sejati harus disertai dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami proses perencanaan dan kebijakan desa, penyediaan akses informasi yang memadai, serta penciptaan iklim demokrasi deliberatif yang membuka ruang dialog antarkelompok. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendorong transformasi ini, dengan menjadikan warga—termasuk kelompok marginal—sebagai mitra sejajar dalam proses pembangunan. Hanya dengan demikian, partisipasi dapat berkembang dari aktivitas simbolik menjadi kekuatan transformatif yang mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan.

Kendala Partisipasi dan Akar Kemarginalan

Partisipasi masyarakat marginal dalam pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari berbagai hambatan struktural dan kultural yang telah mengakar secara sistemik. Hasil temuan lapangan di Desa Masgo mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan formal di kalangan warga, minimnya literasi digital, serta terbatasnya akses terhadap informasi pembangunan dan kebijakan desa menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan aktif masyarakat. Dalam konteks ini, ketidaktahuan bukan sekadar akibat kurangnya informasi, tetapi merupakan hasil dari eksklusi yang bersifat struktural dan terus direproduksi oleh sistem yang tidak inklusif.

Lebih jauh lagi, kemiskinan yang dialami masyarakat Desa Masgo bukanlah kemiskinan dalam pengertian tunggal, melainkan bersifat multidimensi. Keterbatasan ekonomi, ketergantungan terhadap sektor pertanian tradisional yang bersifat subsisten, minimnya akses modal, hingga keterbatasan jejaring sosial-ekonomi memperkuat kondisi keterisolasian warga. Selain itu, rendahnya rasa percaya diri untuk terlibat dalam proses musyawarah atau menyampaikan pendapat dalam forum publik juga menjadi salah satu penghambat partisipasi substantif. Secara kultural, nilai-nilai lokal yang memosisikan warga sebagai “penerima kebijakan” dan bukan sebagai subjek pembangunan, turut melanggengkan pasifnya keterlibatan masyarakat marginal.

Dalam perspektif kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999), kemiskinan tidak sekadar dilihat dari sisi kekurangan materi atau pendapatan semata, melainkan sebagai keterbatasan kemampuan dasar dan kebebasan individu dalam menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Dalam konteks ini, warga Desa Masgo mengalami keterbatasan dalam hal kebebasan memilih dan bertindak, termasuk dalam keterlibatan mereka dalam proses pembangunan desa. Mereka tidak memiliki cukup kapabilitas untuk mempengaruhi kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka sendiri.

Pendekatan ini sejalan dengan hasil penelitian Sutaryo & Pribadi (2020), yang menegaskan bahwa masyarakat desa yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, informasi, serta ruang kebijakan, pada akhirnya tidak memiliki kapasitas maupun keberanian untuk menentukan arah pembangunan. Tanpa dukungan yang sistematis dari aktor pemerintah desa

maupun lembaga pemberdaya lainnya, masyarakat marginal akan terus berada dalam posisi pasif dan cenderung hanya menjadi objek program, bukan subjek perubahan.

Situasi ini juga tercermin dalam dinamika sosial di Desa Masgo. Di tengah berbagai keterbatasan, tidak terlihat adanya upaya terstruktur dari pemerintah desa untuk menyediakan strategi afirmatif—seperti pelatihan partisipatif, fasilitasi dialog warga, atau penyediaan informasi dalam format yang mudah diakses—yang dapat memperkuat kapasitas kelompok marginal. Akibatnya, partisipasi warga masih terjebak dalam tataran simbolik dan prosedural, di mana mereka hadir secara fisik dalam forum musyawarah atau kegiatan pembangunan, tetapi tidak memiliki ruang pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Tanpa perubahan pendekatan, partisipasi seperti ini hanya akan menjadi formalitas belaka, yang tidak menyentuh aspek transformasi sosial maupun pemberdayaan sejati. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang terarah dan berkeadilan untuk menciptakan ekosistem pembangunan desa yang benar-benar partisipatif, di mana kelompok marginal dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa.

Modal Sosial dan Inisiatif Lokal sebagai Kekuatan Penggerak

Meskipun masyarakat Desa Masgo berada dalam kondisi yang secara struktural termarginalkan, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap pelayanan publik, mereka tetap memiliki kekuatan sosial yang patut diapresiasi. Kekuatan ini terwujud dalam bentuk modal sosial yang tinggi, antara lain berupa solidaritas komunitas yang kokoh, budaya gotong royong yang masih lestari, serta jaringan hubungan sosial antarwarga yang erat. Nilai-nilai ini menjadi elemen fundamental yang menopang ketahanan sosial masyarakat dan menjadi penggerak utama dalam menghadapi berbagai keterbatasan yang ada.

Modal sosial tersebut telah membentuk fondasi bagi tumbuhnya berbagai inisiatif lokal berbasis partisipasi masyarakat, seperti upaya swadaya memperbaiki akses jalan desa yang rusak, pengelolaan sumber air bersih secara kolektif, serta pembentukan kelompok ekonomi berbasis komunitas seperti kelompok tani dan simpan-pinjam warga. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya mencerminkan semangat kemandirian, tetapi juga menunjukkan adanya

kesadaran kolektif bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada intervensi dari luar, melainkan perlu ditopang oleh kekuatan dari dalam komunitas itu sendiri.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Damayanti & Purwanto (2021), yang mengemukakan bahwa desa-desa dengan tingkat modal sosial yang tinggi cenderung memiliki tingkat keberhasilan pembangunan yang lebih baik. Hal ini terjadi karena adanya rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dijalankan. Ketika warga merasa bahwa program tersebut berasal dari dan untuk mereka, maka tingkat partisipasi, kepedulian, dan komitmen untuk menjaga keberlanjutan program pun meningkat secara signifikan.

Selanjutnya, Kurniawan & Susanti (2021) menekankan bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana program-program pembangunan selaras dengan nilai-nilai sosial dan kultural lokal yang telah hidup dan mengakar. Pemberdayaan yang memaksakan pendekatan teknokratis atau bersifat seragam justru cenderung gagal karena tidak mendapat dukungan emosional maupun sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada kekuatan lokal menjadi kunci utama dalam mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan.

Dalam konteks Desa Masgo, kekayaan modal sosial ini dapat menjadi titik masuk strategis dalam merancang dan menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa perlu mengidentifikasi, mengakui, dan memfasilitasi kekuatan sosial yang sudah ada dalam komunitas, bukan menggantikannya dengan sistem dari luar yang tidak sesuai konteks. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas pembangunan desa, tetapi juga mempercepat proses kemandirian warga dalam mengelola sumber daya dan menyelesaikan persoalan secara mandiri.

Dengan demikian, strategi pemberdayaan masyarakat marginal semestinya tidak dimulai dari “ketiadaan”, melainkan dari apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat—yakni solidaritas sosial, keswadayaan, dan semangat kolektivitas. Ketika pemerintah desa mampu membangun kemitraan yang sejajar dengan komunitas lokal dan menyusun kebijakan yang responsif

terhadap potensi sosial masyarakat, maka partisipasi akan berkembang secara alami menjadi kekuatan transformatif yang berkelanjutan.

Sinergi antara Pemerintah Desa dan Masyarakat

Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam upaya mewujudkan kemandirian desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Dalam konsep pembangunan berbasis komunitas, relasi kolaboratif antara struktur kelembagaan formal (pemerintah desa) dan kekuatan sosial lokal (komunitas) harus berjalan secara seimbang, saling memperkuat, dan dibangun atas dasar kepercayaan, transparansi, serta inklusivitas. Kemandirian desa tidak akan tercapai jika pemerintah hanya bertindak sebagai pemegang otoritas tunggal, sementara masyarakat tetap diposisikan sebagai objek pasif yang menerima hasil kebijakan tanpa keterlibatan yang berarti.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud di Desa Masgo. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa pemerintah desa belum membuka ruang yang cukup luas bagi Masyarakat-khususnya kelompok marginal-untuk terlibat secara aktif dan setara dalam proses pembangunan. Musyawarah desa (Musdes) sebagai instrumen demokrasi lokal sering kali berlangsung secara prosedural dan formalistik, tanpa didahului oleh proses dialog atau diseminasi informasi yang memadai. Akibatnya, banyak warga yang tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap isu-isu pembangunan desa, termasuk pengelolaan anggaran, prioritas program, serta hak partisipatif mereka dalam perencanaan dan pengawasan.

Ketiadaan mekanisme pemberdayaan informasi serta minimnya forum dialog yang bersifat terbuka dan inklusif menyebabkan partisipasi Masyarakat-terutama kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, petani kecil, dan warga miskin-berada pada level simbolik. Masyarakat hadir secara fisik dalam forum-forum desa, namun tidak memiliki kapasitas maupun ruang untuk menyampaikan aspirasi secara kritis dan strategis. Ini berimplikasi serius pada lemahnya kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan desa, serta pada kurangnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan yang dijalankan.

Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, partisipasi masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan desa. Regulasi ini menegaskan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip inklusivitas, partisipatif, dan pemberdayaan. Sinergi ideal hanya dapat tercapai apabila pemerintah desa menyediakan ruang yang transparan, aksesibel, dan ramah terhadap aspirasi warga, sementara masyarakat juga diposisikan sebagai aktor strategis yang mampu mengorganisasi dirinya untuk berkontribusi secara aktif.

Dalam kerangka tersebut, dibutuhkan transformasi pendekatan dari yang bersifat birokratis dan top-down menjadi model yang bersifat kolaboratif dan partisipatoris. Pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai perancang dan pelaksana program, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator yang membuka ruang inisiatif warga. Di sisi lain, masyarakat perlu diberikan pelatihan dan pendampingan agar memiliki kapasitas analitis, komunikatif, dan organisasional yang memadai untuk berpartisipasi secara bermakna dalam forum-forum pembangunan desa.

Aulia dan Handayani (2022) menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan berbasis komunitas sangat tergantung pada adanya kolaborasi yang harmonis antara kelembagaan formal dan kekuatan sosial lokal. Keduanya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus berinteraksi dalam relasi yang setara dan saling melengkapi. Dalam konteks Desa Masgo, kolaborasi tersebut harus diperkuat melalui berbagai strategi, antara lain: penyediaan akses informasi publik yang terbuka dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat; pelatihan peningkatan kapasitas warga terkait hak, perencanaan pembangunan, dan pengawasan anggaran; serta penciptaan ruang musyawarah yang mengedepankan prinsip kesetaraan, transparansi, dan keberagaman suara.

Apabila langkah-langkah tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, maka sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat tidak hanya menjadi jargon pembangunan, tetapi akan terwujud sebagai kekuatan transformatif dalam mendorong kemandirian desa yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat marginal di Desa Masgo memiliki peran penting dalam mendorong proses pembangunan desa, meskipun masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan struktural dan kultural. Masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dalam bentuk inisiatif lokal seperti gotong royong, pengelolaan sumber daya alam secara kolektif, serta pembentukan kelompok ekonomi komunitas. Modal sosial yang tinggi menjadi kekuatan utama masyarakat dalam merespons berbagai persoalan lokal secara mandiri.

Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam forum formal seperti musyawarah desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip inklusivitas dan pemberdayaan. Keterlibatan masyarakat, khususnya kelompok marginal, masih bersifat simbolik dan prosedural karena terbatasnya akses terhadap informasi, rendahnya literasi kebijakan, serta dominasi elit dalam proses pengambilan keputusan.

Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan kemandirian desa yang partisipatif. Pemerintah desa perlu membangun ruang dialog yang terbuka, memperkuat kapasitas warga melalui pelatihan, serta memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan strategi yang inklusif dan berbasis pada kekuatan lokal, partisipasi masyarakat marginal dapat ditransformasikan menjadi kekuatan sosial yang berkelanjutan dalam mendorong kemandirian Desa Masgo.

BIBLIOGRAFI

- Aulia, R., & Handayani, T. (2022). Model Pemberdayaan Berbasis Partisipasi dalam Mewujudkan Desa Mandiri. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 45–60.
- Bappeda Kabupaten Kerinci. (2023). Laporan Evaluasi Pembangunan Desa Terpencil di Kabupaten Kerinci. Kerinci: Pemerintah Daerah.

Damayanti, R., & Purwanto, A. (2021). Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Marginal dalam Musyawarah Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 6(2), 103–120.

Kemendesa PDTT. (2023). *Panduan Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi dan Inklusi Sosial*. Jakarta: Kementerian Desa.

Pretty, J. N. (1995). Participatory Learning for Sustainable Agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Sutaryo, & Pribadi, U. (2020). Kapabilitas Masyarakat dan Pembangunan Desa di Indonesia: Suatu Pendekatan Alternatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 55–70.

Aulia, R., & Handayani, T. (2022). Model Pemberdayaan Berbasis Partisipasi dalam Mewujudkan Desa Mandiri. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 45–60.

Damayanti, R., & Purwanto, A. (2021). Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Marginal dalam Musyawarah Desa terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 6(2), 103–120.

Kemendesa PDTT. (2023). *Panduan Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi dan Inklusi Sosial*. Jakarta: Kementerian Desa.

Kurniawan, R., & Susanti, L. (2021). Partisipasi dan Kemandirian Desa: Studi Kasus pada Desa Terpencil di Sumatera. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 115–130.

Nugroho, H. (2018). *Membangun dari Pinggiran: Kritik dan Alternatif Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: LP3ES.

Pretty, J. N. (1995). Participatory Learning for Sustainable Agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Sutaryo, & Pribadi, U. (2020). Kapabilitas Masyarakat dan Pembangunan Desa di Indonesia: Suatu Pendekatan Alternatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 55–70.